

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal

Nursakilah Lubis¹, Nurlaila²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Prodi Akuntansi Syariah

nursakilah13@gmail.com¹, nurlaila@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aimed to distinguish the use of accrual-based accounting in the Department of Cooperatives and UMKM in Mandailing Natal Regency. The accrual-based Government Accounting Standards are standards that record and consider when transactions occur, regardless of cash received or paid. Accrual-based accounting is accounting that plays an important role in making financial reports for companies, especially at the Cooperatives and UMKM in Mandailing Natal with supervision and motivation from the Indonesia Government financial reporting, in the Cooperatives and UMKM Service in Mandailing Natal Regency. On the other hand, it has been started implemented qualitatively. The results showed that Mandailing Natal Regency Cooperatives and UMKM Service has not been able to apply Accrual-Based Accounting.

Keywords : *accrual-based accounting*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat penggunaan Akuntansi Berbasis AkruaI di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI merupakan standar yang mencatat dan menganggapnya saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akruaI merupakan akuntansi yang berperan penting dalam membuat laporan keuangan pada perusahaan terutama pada Dinas Koperasi dan UMKM di Mandailing Natal dengan pengawasan dan motivasi dari pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia terutama di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal belum betul-betul menggunakan akuntansi berbasis akruaI ini. Tetapi, sudah mulai menerapkannya dengan metode kualitatif. Hasilnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal belum mampu menerapkan Akuntansi Berbasis AkruaI.

Kata kunci: akuntansi berbasis akruaI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah dikategorikan sebagai salah satu bentuk prinsip akuntansi. Prinsip akuntansinya ditetapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuannya agar kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang jujur dan transparan. Akuntansi Berbasis AkruaI diartikan sebagai akuntansi yang mengakui adanya transaksi dan kejadian tertentu tanpa mengetahui pelunasan kas telah dibayarkan atau belum. Beberapa negara telah menerapkan akuntansi Berbasis AkruaI ini seperti Selandia Baru, Australia, dan Inggris. Basis akruaI ini tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan keuangan, tetapi juga

untuk pembuatan anggaran. Sebagai contoh, negara-negara anggota OECD dominan menggunakan basis akrual sebagai penyusunan laporan keuangan daripada anggaran.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi akuntansi Berbasis Akrual. Pertama, penganggaran secara akrual diyakini mendispilkan anggaran. Dalam pelaporannya, keputusan politik harus ada kaitannya dengan kepastian waktu anggaran dilaporkan dan hanya basis kas yang memenuhi syarat. Kedua, adanya resistensi oleh legislator ketika ingin mengadopsi anggaran aktual. Hal itu disebabkan konsep akrual bersifat kompleks, menurut OECD-PUMA/SBO, 2002/10. Di sisi lain, penerapan akrual dapat menimbulkan masalah yang rumit jika hanya diterapkan dalam membuat laporan keuangan dan tidak ada rancangan laporan anggaran. Sebagai dokumen utama dari manajemen sektor publik atau pemerintah, anggaran dibuat berdasarkan persetujuan legislator (DPR/DPRD). Jika anggaran hanya berfokus pada basis kas, maka legislator hanya akan memperhatikan sumber daya berbasis kas. Oleh karena itu, basis akrual diimplementasikan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berbeda.

Penggunaan basis akrual menjadi salah satu ciri dari penerapan manajemen keuangan modern (sektor publik). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih jujur dan transparan, terutama biaya (*cost*) pemerintah. Selain itu, kualitasnya juga dapat ditingkatkan terutama dalam pengambilan keputusan dan tidak terbatas hanya dari basis kas. Secara umum, negara-negara yang menerapkan basis akrual ini telah melakukan reformasi manajemen publik. Tujuannya untuk meminta laporan pertanggungjawaban manajemen dari sisi keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*). Di saat yang bersamaan, juga melonggarkan kontrol masukan (*input*).

Rumusan Masalah

Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah “Bagaimana Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal?”

Tujuan Penelitian

Pemeriksaan ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana akuntansi berbasis akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal diterapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Pemerintah

Sinaga (2005) mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai acuan dalam menyamakan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. SAP berperan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Juga, dalam kajian laporan keuangannya. Tujuannya laporan keuangan yang telah dirancang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas.

Laporan keuangan wajib dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan SAP. SAP diteapkan sebagai bentuk peningkatan laporan keuangan pemerintah.

Untuk memahami informasi dalam laporan keuangan eksternal auditor atau Badan Pemeriksa Keuangan, pengguna laporan keuangan termasuk badan legislatif akan menggunakan laporan tersebut sebagai kriteria pelaksanaan audit. Kemudian, laporan keuangan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pengertian Basis Akrua

Akuntansi basis akrual diartikan sebagai laporan keuangan dimana suatu transaksi atau diakui saat itu juga (*real time*) tanpa melihat kas atau setara dengan kas yang diterima atau dibayarkan, meliputi hak dan kewajiban suatu transaksi. Laporan akuntansi berbasis akrual dipilih karena memenuhi syarat tujuan pelaporan yang basis kas tidak dapat memenuhinya. Tujuannya yaitu sebagai tujuan manajerial dan pengawasan.

Penerapan akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk mengatasi ketidakcukupan basis dan data yang disajikan akan lebih akurat. KSAP (2006:1) dalam wacana akuntansi menjelaskan secara konseptual laporan akuntansi berbasis akrual dapat lebih transparan dan akuntabel daripada berbasis kas. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, perhitungan biaya pelayanan publik lebih dapat dihitung dan bernilai wajar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, nilai yang mencakup tidak hanya tentang jumlah uangnya, tetapi seluruh beban saat adanya transaksi.

Pengukuran laporan keuangan lebih baik dapat diperoleh dengan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal itu dikarenakan beban secara keseluruhan ikut dihitung dan dilaporkan, termasuk beban yang telah dilunasi atau belum. Sebagai tambahan, laporan keuangan ini diakui dengan tepat waktu dan sebagai bentuk pelaporan di masa yang akan datang. Sebagai tambahan, informasi tentang penggunaan sumber daya ekonomi dapat terekam pendataannya dalam rangka pengukuran kinerja. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual dijadikan sebagai faktor pendukung dalam menghasilkan laporan akuntansi yang transparan dan akuntabel bagi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan eksplorasi. Penelitian deskriptif merupakan strategi pemeriksaan yang membahas tentang beberapa jawaban potensial untuk masalah yang dapat dibuktikan melalui pengumpulan informasi, pengembangan, penjelasan, dan penyelidikan. Penelitian ini menggambarkan informasi menjelaskan tentang informasi penerapan akuntansi akrual. Eksplorasi ini dipimpin dengan memanfaatkan strategi eksplorasi lapangan yang diselesaikan langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitiannya berada di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal di Kompleks Perkantoran Payaloting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 24 Januari hingga selesai.

Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Informasi

Peneliti memanfaatkan informasi kuantitatif sebagai Laporan Pendapatan Usaha Mikro. Peneliti mengumpulkan informasi melalui catatan atau laporan yang dianggap signifikan, seperti Data Pendapatan Usaha Mikro Kabupaten Mandailing Natal tahun 2021.

2. Metode Pengumpulan Informasi

Peneliti memperoleh data dengan melakukan observasi ke lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak tertentu yang ahli dalam merancang laporan keuangan akuntansi berbasis akrual.

Metode Analisis Data

Peneliti menganalisis data dengan menjelaskan pemeriksaan subyektif. Tujuannya untuk menentukan strategi penelitian agar data dapat diolah sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti juga mengembangkan hipotesis dari informasi yang diperoleh dari penyelidikan lapangan, kemudian melanjutkan proses penelitian dengan mengumpulkan berbagai informasi dari persepsi hingga menyiapkan laporan untuk memaknai suatu kejadian. Dua cara untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual di Dinas Koperasi dan UMKM Mandailing Natal.
2. Informasi mengenai Pendapatan Usaha Mikro di Kabuapten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penerapan Akauntansi Berbasis Akrual adalah penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk pengelolaan data keuangan. Langkah pertama dimulai dari masa transisi sampai masa penerapan basis akrual secara keseluruhan. Kemudian, penggunaan teknologi yang harus dimaksimalkan yaitu pada bidang teknologi informasi pada sistem akuntansi.

Sistem akuntansi berbasis akrual dapat dianalisis berdasarkan kesiapan sistem informasi akuntansi. Jika sistem informasi akutansinya siap, maka laporan keuangan akan dengan mudah dirancang. Namun, persiapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan membutuhkan tenaga ahli IT yang menguasai instalasi sistem informasi akuntansi yang bersifat rumit. Sebagai hasilnya, sistem laporan keuangan Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal telah disubsidi oleh pusat. Dengan persiapan yang baik dan terstruktur, sistem akuntansi akrual sangat baik diterapkan di seluruh instansi pemerintahan pusat atau daerah. Akuntansi dengan basis akrual dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, kantor kedinasan termasuk Dinas Koperasi dan UMKM mulai diintegrasikan dengan

teknologi *Multi User* dan teknologi *Clean/Server*. Jadi, penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal telah diterapkan menggunakan sistem manajemen akuntansi pusat dan daerah dan didukung dengan sistem IT sesuai dengan kebutuhan instansi.

KESIMPULAN

Penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal digolongkan dalam tahap persiapan menuju kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Bentuk persiapan pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan melakukan sosialisasi kepada aparat, mengadakan pelatihan kepada bagian keuangan di SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal, menetapkan kebijakan akuntansi dengan sistem akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menerapkan tata cara pengelolaan keuangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual tahun 2022.

Kesimpulan dari uraian di atas adalah :

- 1) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya menguasai basis akrual berdasarkan kualitas sumber daya manusianya sehingga perlu adanya pelatihan sistem informasi manajemen dalam penerapannya.
- 2) Kesiapan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal telah meningkatkan sistem IT nya dengan tersedianya *software* dan *hardware* sebagai pendukung penerapan SAP berbasis akrual.
- 3) Peraturan Pemerintah dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal sejalan dan peraturannya sebagai faktor pendukung dalam menerapkan basis akrual.

SARAN

Saran peneliti dirumuskan dalam tiga poin di bawah ini:

- 1) Pemahaman SAP berbasis akrual perlu dikembangkan pemahamannya.
- 2) Pelatihan dan bimbingan SKPD Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan evaluasi pelatihan agar dapat meningkatkan keahlian.
- 3) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara atasan dan bawahan agar lebih selaras dan menghindari kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kristiawati, E. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi BerbasisAkrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. Jurnal Akuntansi, Vol. III, No.3. <https://doi.org/10.15408/akt.v8i3.2771>. Di Akses Pada Tanggal 1 November 2018.

- Lamonisi, S. 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No.1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592/11188>. Di Akses Pada Tanggal 19 November 2018.
- Fakhrurazi, 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://fakhrurazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/> di akses pada 27 Januari 2015.
- Faradillah, Andi, 2013. Analisis kesiapan pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (pp No.71 Tahun 2010). Makassar, Universitas Hasanuddin. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 41 Tahun 2016
- Putra, I. W. G. Y. D., dan Ariyanto, D. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11172>. Di Akses Pada Tanggal 9 November 2018.
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sector public, Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis penerapan standar akuntansi berbasis akruwal pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 223-230. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11592>